

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, kecanggihan informasi dan teknologi semakin berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia yang ingin serba instan. Salah satunya kebutuhan manusia terkait dengan sistem pembayaran dalam jual beli. Banyak para konsumen yang menginginkan cara instan dalam membeli suatu barang.

Pada awal mula sebelum dikenalnya uang dikalangan masyarakat, semua transaksi dilakukan dengan sistem barter, yaitu pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan jasa, ataupun jasa dengan jasa. Kemudian setelah diketahui transaksi dengan menggunakan sistem barter masih kurang efektif dan efisien, maka muncul transaksi dengan menggunakan uang.

Uang yang beredar di Indonesia diterima oleh masyarakat umum, karena masyarakat percaya bahwa uang tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar dan alat pembayaran. Uang juga mudah disimpan karena bentuknya kecil sehingga praktis untuk menyimpannya. Uang mempunyai nilai yang tetap, meskipun disimpan di dalam saku selama seminggu akan mempunyai nilai yang tetap.¹

Namun, sejalan dengan menggunakan uang dalam transaksi jual beli mengalami berbagai hambatan tertentu. Jika penggunaan dalam jumlah besar, maka hambatannya adalah resiko membawa uang tunai sangat besar. Resiko yang

¹ Sutarto, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 129.

timbul dan harus dihadapi adalah seperti resiko kehilangan, pemalsuan, atau terkena perampokan. Akibatnya kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya.²

Secara umum, sistem pembayaran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem pembayaran secara Tunai dan sistem pembayaran secara non Tunai. Sistem pembayaran tunai atau biasa disebut dengan pembayaran *cash*, merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai yang dilakukan dengan menggunakan uang kartal (uang kertas dan uang logam).

Sedangkan sistem pembayaran secara non Tunai adalah sarana pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan media kertas (*paper based instrument*). Selain itu, berkembang pula *card based instrument* dan *elektronik based instrument* dalam alat pembayaran non tunai yang sepertinya bakal menggantikan penggunaan uang tunai.

Alat pembayaran yang mengarah ke non Tunai sepertinya ditangkap oleh beberapa bank syariah yang salah satunya dilakukan dengan memberikan produk kartu kredit syariah (*Islamic Card*) kepada nasabah. Dengan menggunakan kartu kredit atau kartu pembiayaan, transaksi pembayaran bisa dengan mudah dan cepat dilakukan. Tanpa harus membawa uang di tangan, segala macam transaksi tetap bisa dilakukan.³

Namun, risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/ atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 317.

³ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Trans Media, 2011), hlm. 155.

mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan *likuiditas*, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁴

Produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah sangat berbeda dengan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah meliputi *wadiah* (jasa penitipan), deposito *mudhorabah*. Produk-produk bagi hasil, produk jual beli seperti *murabahah*, produk sewa seperti *al-ijarah* kemudian produk jasa meliputi *kafalah* dan *qard*.⁵

Selain produk di atas yang ditawarkan oleh perbankan syariah, masih banyak lagi produk lainnya yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Salah satunya adalah produk kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh bank BNI Syariah dengan nama *iB Hasanah Card*. Dengan diberikan fasilitas berupa ATM (*Automated Teller Machine*) dan kartu kredit syariah yang pada saat ini sedang berkembang dimasyarakat. Secara prinsipnya, kartu kredit syariah dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem *riba* yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada pihak penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak.

Kartu kredit (*Credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), hlm. 310.

⁵ Ian Abimanyu, *Ganti Rugi (Ta'widh) Pada IB Hasanah Card*, diakses melalui <http://ianabimanyusgm.blog.spot.com/2013>, diakses pada tanggal 25 November 2015.

sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan lalu termasuk bunga (*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya.⁶

Demikian pula untuk mempermudah transaksi ekonomi, Bank Syariah dianggap perlu menyediakan sejenis produk kartu kredit syariah (*syariah card*). *Syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.⁷

Dalam *syariah card* terdapat tiga macam akad, yaitu:⁸

1. *Kafalah*: dalam hal ini penerbit adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee*.
2. *Ijarah*: dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.
3. *Qard*: dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 208.

⁷ *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah fatwa DSN_MUI No. 54 tentang kartu kredit syariah.

⁸ http://www.MUI_In/product_2/fatwa.php?id=64&pg=3, diakses pada tanggal 25 November 2015.

Dari sini dapat dilihat bahwa *syariah card* adalah salah satu bentuk dari hutang piutang yang modern, dimana selain *qard* (hutang piutang) juga terdapat akad lain yaitu *kafalah* dan *ijarah*. Dari akad *kafalah* dan *ijarah* bank mendapatkan *fee* atas jasa yang dilakukan, dan itu memang dibenarkan dalam hukum Islam. Namun bagaimana dengan akad *qard*, yang menggunakan denda finansial bagi nasabah yang terlambat membayar tagihannya.

Namun terdapat perbedaan antara denda keterlambatan/ *ta'widh* yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan praktek *ta'widh* di perbankan syariah, dalam hal kartu kredit syariah. Dalam fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam ketentuan umum ayat empat, disebutkan: “Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*) atau *al-furshah al-dha-i'ah*”.⁹

BNI Syariah kantor cabang Bandung yang menerbitkan *iB Hasanah Card*, menetapkan *ta'widh* dengan cara yang berbeda. *Ta'widh* pada *iB Hasanah Card* ditetapkan berdasarkan jangka waktu bukan kerugian riil yang terjadi. Dalam penentuan *ta'widh* di BNI Syariah Cabang Bandung ditentukan besaran pembayaran sesuai jangka waktu bukan berdasarkan kerugian riil.

Menurut Ketua DSN-MUI KH. Ma'ruf Amien, ongkos yang harus diganti haruslah kerugian yang riil bukan kerugian yang diperkirakan terjadi dan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*. Karena jika berdasarkan *time*

⁹ *Al-furshah al-dha-i'ah* atau kesempatan atau peluang yang hilang adalah biaya yang timbul karena lebih memilih menunda pembayaran dari pada membayarnya langsung.

value of money, maka kategorinya mirip dengan riba sehingga tidak dibolehkan.¹⁰

Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian *ta'widh* dengan judul

PENENTUAN *TA'WIDH* DALAM PRODUK *IB HASANAH CARD* DI BANK BNI SYARIAH CABANG BANDUNG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *iB Hasanah Card* dan penentuan *ta'widh* pada Produk *iB Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung?
2. Bagaimana dasar kebijakan tentang penentuan *ta'widh* pada Produk *IB Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung?
3. Bagaimana kesesuaian penentuan *ta'widh* pada Produk *iB Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung dengan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme *iB Hasanah Card* dan penentuan *ta'widh* pada produk *iB Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Bandung.

¹⁰ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/news/berita_syariah/555, diakses pada tanggal 25 November 2015.

2. Untuk mengetahui dasar kebijakan tentang penentuan *ta'widh* pada produk *IB Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penentuan *ta'widh* pada produk *iB Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Bandung dengan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*.

D. Kerangka Pemikiran

Credit card adalah uang plastik suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pembayaran dan pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.¹¹

Dalam fiqh muamalah kartu kredit secara bahasa kata *bithaqah* (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *i'timan* secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya semacam pinjaman dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertentu.¹²

Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan

¹¹ Veithzal Rivai dkk, *Bank And Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm, 1363.

¹² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 303-305).

sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya. Dalam kartu plastik secara syariah tidak dapat digunakan di tempat-tempat maksiat, seperti bar, diskotik, bahkan tidak diperbolehkan digunakan untuk hal yang ada unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Kartu kredit yaitu jenis jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk bisa memperoleh kredit dari bank untuk pembelian barang-barang dagangan, mendapatkan uang tunai, pembayaran dan jasa lain-lain. Kartu kredit berfungsi sebagai sarana pembayaran, pengganti uang tunai pada pembelian di tempat-tempat tertentu. Seperti departemen store, pasar swalayan, hotel, restoran dan tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank penerbit kartu kredit tersebut.¹³

Biaya keterlambatan pembayaran *syariah card* merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah pengguna *syariah card*, ketika seorang nasabah terlambat melakukan pembayaran tagihan atas transaksi yang telah dilakukannya setelah jatuh tempo yang ditetapkan. Biaya keterlambatan yang dikeluarkan oleh nasabah merupakan ganti rugi (*ta'widh*). *Ta'widh* (ganti rugi), menurut pendapat Abd al-Hamid Mahmud al-Bali, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, Al-Qahirah al-Ma'had al-Alami li-al-Fikr al-Islami, berkenaan ganti rugi dalam Islam menyatakan bahwa: Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan

¹³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hlm. 169.

pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.¹⁴

Kemudian biaya keterlambatan atas pembayaran tagihan *syariah card* pada *iB Hasanah Card* tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis kartu yang nasabah gunakan. Adapaun jenis kartu dalam *iB Hasanah Card* digolongkan atas 3 (tiga) jenis, yaitu Kartu Clasicc, Kartu Gold dan Kartu Platinum.¹⁵

Biaya keterlambatan yang dibayarkan oleh nasabah merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak bank. Bank hanya boleh mengakui biaya penagihan (*ta'widh*) yang nilainya sesuai dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank. Misalnya dalam penagihan, bank menghubungi nasabah melalui telepon atau mendatanginya, maka biaya riil yang akibat penagihan ini dapat dibebankan kepada nasabah. Teknik dalam penagihannya pun harus memperhatikan aspek syariah, tidak boleh sama dengan kartu kredit konvensional.¹⁶

Menurut Qadi Muhammad Taqyuddin al-Ustmani mengemukakan pendapatnya, “ yang jelas *Issuer Card* (pihak penerbit) hanya membebankan biaya keterlambatan hanya ketika *Card Holder* (pengguna) terlambat membayar, padahal pihak bank telah memberikan tenggang waktu satu bulan atau dua bulan. Apabila *Card Holder* bisa membayar nilai transaksi yang telah dilakukannya selama waktu tersebut maka ia tidak akan dibebani biaya apapun lagi. Namun,

¹⁴ <http://digilib.sunan-ampel.ac.id>, diakses pada tanggal 25 November 2015.

¹⁵ www.bnisyariah.co.id, diakses pada tanggal 25 November 2015.

¹⁶ <http://ekonomi.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 27 November 2015.

ketika ia terlambat dalam melakukan pembayaran maka ia akan dibebani dengan biaya keterlambatan.”¹⁷

Ketentuan *ta'widh* merujuk pada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 194, yaitu:

...فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

-- ١٩٤

Artinya: “...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”¹⁸

Selain merujuk pada Al-Quran ketentuan *ta'widh* juga merujuk pada Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Dari ‘Amr bin ‘Auf RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R Tirmidzi)”¹⁹

¹⁷ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syari'ah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 184.

¹⁸ Al-Qur'an dan terjemah Al-Kalam...hlm. 30.

¹⁹ Kitab *Bulughul Maram*, No Hadits 894, hlm. 179.

Selain merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, ketentuan *ta'widh* juga merujuk pada kaidah *fiqh*, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Yang menunjukkan pengharaman disini adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengakibatkan ke-*mudharat*-an;
2. Tidak mengandung tipuan (*gharar*);
3. Tidak mengandung Riba;
4. Tidak mengandung judi (*maysir*).

Jadi, semua bentuk muamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip utama muamalah, yaitu seperti prinsip bebas riba, bebas *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan *tadlis*, tidak *maysir*, bebas dari produk haram. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi ketentuan dalam fiqh muamalah.

الضَّرَارُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.²⁰

Dharar ialah posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Hal seperti ini

²⁰ Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, hlm. 17.

memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan dengan batas-batas tertentu.

Jadi, *dharar* disini adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat *mudharat* sekali, maka dalam keadaan seperti ini ke-*mudharat*-an itu membolehkan sesuatu yang dilarang. *Dharar* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.

Kerugian itu tidak akan hilang kecuali diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu mampu yang menunda-nuda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Ketentuan *ta'widh* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* adalah sebagai berikut:²¹

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas;
3. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan;
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan

²¹ Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, hlm. 5.

kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*);

5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dayn*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*;
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak, dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan khusus *ta'widh* menurut Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* adalah sebagai berikut:²²

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya;
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak;
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad;
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Syariah Card dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem *riba* yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada pihak penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak dan hukum dari *riba* itu adalah haram.

Adapun kriteria yang termasuk kedalam *riba* adalah sebagai berikut:

²² *Ibid*, hlm. 6.

1. Setiap bentuk bunga dari hasil hutang-piutang adalah *riba* yang diharamkan, ia tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif;
2. Sedikit atau banyak, *riba* tetap haram, seperti yang ditunjukkan oleh pemahaman yang benar dalam surat Ali Imran ayat 130, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٣٠

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”²³

3. Memberikan pinjaman dengan *riba* adalah haram, tidak bisa dihalalkan oleh kebutuhan dan keterpaksaan. Meminjam dengan *riba* juga diharamkan kecuali karena desakan kebutuhan dan keterpaksaan yang kadarnya tergantung kepada keimanan seseorang;
4. Aktivitas bank berupa pelayanan rekening berjalan, penukaran cek, dan surat-surat berharga lainnya termasuk aktivitas perbankan yang dibolehkan dan biaya yang diambil untuk aktivitas ini tidak termasuk *riba*;
5. Deposito, membuka rekening dengan bunga dan setiap peminjaman yang berbunga merupakan transaksi *riba* dan haram.²⁴

²³ Al-Kalam, *Op Cit*, hlm. 66.

²⁴ Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 71-72.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah produk *IB Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung. Adapun alasan penulis meneliti produk *IB Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung adalah:

- a. Produk *IB Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung sangat menarik untuk diteliti.
- b. Tempat penelitiannya mudah terjangkau karena dekat dengan tempat tinggal penulis yaitu masih berada di daerah Bandung.

2. Metode Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian penulis menggunakan metode deskriptif studi kasus. Studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara detail dan jelas. Studi kasus ini pada umumnya menghasilkan gambaran dari hasil pengumpulan data dan analisis data dalam satu jangka waktu tertentu. Fokus utamanya dalam studi kasus adalah menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana. Metode penelitian ini menggambarkan tentang penentuan *ta'widh* pada produk *iB Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung.

3. Teknik Penelitian

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati terhadap penelitian. Observasi berguna untuk melihat

dan memahami faktor-faktor yang ada. Menurut Syaodih N memaparkan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dengan cara datang langsung ke Bank yang akan diteliti sesuai masalah yang diperlukan oleh peneliti dimana peneliti melakukan observasi langsung dengan pihak Bank yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.²⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan langsung dengan cara tanya jawab kepada orang *representatif* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung yaitu Bapak Elang sebagai pihak yang menangani tentang produk *iB Hasanah Card* guna menambah bahan acuan penelitian. Sudjana mengemukakan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).²⁶

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pelaksanaan produk *iB Hasanah Card* dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁵ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 103.

²⁶ *Ibid*, hlm. 130.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah dengan penelitian secara kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah suatu proses *inquiry* tentang pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis terpisah, jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial dan manusia, peneliti membangun suatu kompleks, gambaran holistik, meneliti kata-kata, laporan-laporan memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu pengaturan yang alami.²⁷

Dilihat dari tujuan dan metode/ tekniknya penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana sekumpulan data yang diperoleh dari penelitian yang merupakan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan kepada pihak bank syariah terhadap masalah yang diidentifikasi oleh peneliti pada tujuan yang telah ditetapkan.

Masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah terkait dengan penentuan *ta'widh* pada produk *iB Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung.

5. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa *interview* dan observasi.

²⁷ *Ibid*, hlm. 103.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah produk *iB Hasanah Card* yang dikeluarkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Bandung dan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīdh*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Data penunjang dan pelengkap yang berkaitan dengan penelitian antara lain buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan di atas diantaranya buku, skripsi, catatan perkuliahan, referensi buku, artikel dan internet.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan melalui perantara oranglain dan dokumen-dokumen seperti buku, artikel bahkan media internet dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber data juga didapat dari buku-buku yang membahas tentang lembaga keuangan syariah, muamalah, produk-produk perbankan syariah atau bahkan jurnal-jurnal syariah yang ditulis dalam sebuah blog ataupun PDF.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahapan yang ditempuh dalam pengumpulan, pemilahan, pemilihan, dan penyusunan data dari data-data yang telah ditemukan oleh peneliti²⁸ di mana setelah data terkumpul dari data primer dan data sekunder, maka peneliti mulai melakukan pemilihan data yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti di Bank BNI Syariah Cabang Bandung, setelah itu

²⁸ *Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, 2010), hlm. 8.

peneliti mengolah data-data tersebut dan disusun sesuai masalah dan tujuan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya.²⁹ Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema atau kategori tertentu. Setiap penafsiran data akan memberi makna pada analisis. Langkah utama dalam analisis data adalah pengumpulan data, perbaikan kerangka data sehingga lebih akurat, penyusunan unsur-unsur data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna, *reinterpretasi* data melalui hubungan-hubungan dan akurasi hubungan antardata, melakukan perubahan yang mengarah pada pengumpulan data guna mempermudah pelaksanaan penelitian berikutnya.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm. 97.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 95.